

SEMNASIA**(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)**

“Urgensi Pelayanan SKCK dalam peningkatan peluang karir di Indonesia”
10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Urgensi Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dalam peningkatan peluang karir di Indonesia

^a Asep Adi Hijriyadi ^b Priyo Handoko

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Jl. Raya Serang KM.1,5 Cikondang
 Pandeglang, Banten Indonesia, 42213

e-mail : ^a Asepadi894@gmail.com^b pryohandoko69@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota pelaksana dan pemohon SKCK, observasi langsung di lokasi pelayanan, serta analisis dokumen terkait. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti waktu tunggu yang lama akibat antrian panjang, responsivitas petugas yang kurang optimal saat situasi ramai, dan transparansi biaya yang belum sepenuhnya jelas. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan SKCK. Karena Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diperlukan untuk melamar pekerjaan dan untuk meningkatkan karier, jumlah pelamar dari lulusan pendidikan meningkat. Calon pekerja yang pernah melakukan tindak pidana atau sedang terlibat dalam proses hukum tidak akan diberikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan akibatnya, mereka tidak akan diterima bekerja..

Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan; Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Abstract

This study aims to determine the quality of Police Record Certificate (SKCK) service. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection

was carried out through interviews with implementing members and SKCK applicants, direct observation at the service location, and analysis of related documents. However, there are several aspects that need to be improved, such as long waiting times due to long queues, less than optimal officer responsibility in crowded situations, and cost transparency that is not yet fully clear. This study provides several recommendations to improve the quality of SKCK services. Applications for Police Record Certificates (SKCK) by graduates of educational levels have increased because they are a requirement for applying for jobs, supporting career advancement. Job applicants who are involved in criminal acts or are in legal cases will not get a Police Record Certificate (SKCK), so they will not be accepted to work if they apply for work.

Keywords: Quality; Service; Police Record Certificate; Career Opportunities

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Urgensi Pelayanan SKCK dalam peningkatan peluang karir di Indonesia”
10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini pemerintah mulai gencar-gencarnya menciptakan inovasi-inovasi kreatif di bidang pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai aparaturnegara. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di mana pengertian Pelayanan Publik adalah “bahwa segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan umum maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan hal tersebut instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat dan prima dan muara akhirnya terciptalah kepuasan pada pengguna jasa (Wahyuni et al., 2024).

Menurut Kotler & Keller (2012), kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap kinerja (hasil) suatu produk dengan harapan yang dimiliki. Menurut Day dalam Tjiptono (2016), bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelum (atau norma kinerja lain) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Pelayanan yang maksimal bisa menjadikan organisasi tersebut dapat melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, dan jika hasilnya baik bisa dikatakan organisasi tersebut telah efektif. Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi, organisasi pemerintah harus bisa menyesuaikan perkembangan yang sedang terjadi dan terus melakukan evaluasi guna dapat memberikan kinerja dan pelayanan yang baik (Wahyuni et al., 2024).

Dengan adanya lembaga pemerintahan, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang wajib dilakukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat maupun organisasi itu sendiri. Pelayanan yang maksimal akan membuat pemerintah berhasil melaksanakan tujuan yang mereka capai dan yang telah ditetapkan. Seiring berkembangnya aman pemerintah juga harus bisa menyesuaikan kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kinerja yang baik dimulai dari kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Pemerintah juga akan selalu berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang adil, efektif, dan profesional. Oleh karena itu, seorang pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu. yang mampu memberikan pelayanan yang prima.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan akan kurangnya pelayanan pemerintah karena adanya fasilitas yang kurang baik dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah sangat memakan waktu. Dalam hal ini pemerintah harus bisa memperbaiki pelayanannya karena kepuasan masyarakat menjadi hal penting akan keberhasilan organisasi. Penelitian ini berusaha untuk melihat kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ditentukan oleh undang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan publik adalah

SEMNASIA

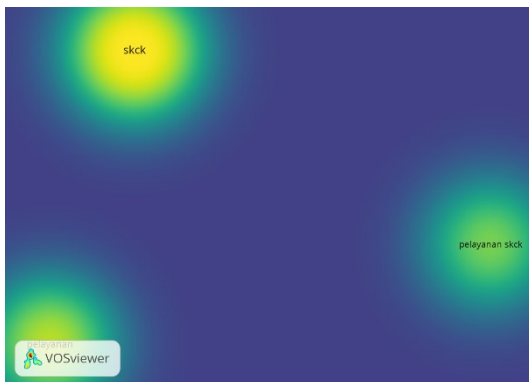
(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Urgensi Pelayanan SKCK dalam peningkatan peluang karir di Indonesia”
10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sesuai dengan fungsi kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah melayani, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, polisi tentunya harus selalu siap memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat. Salah satu unit pengabdian kepada masyarakat adalah pembuatan SKCK.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2014, disebutkan bahwa pengertian SKCK Polri adalah sebagai berikut: "Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut." Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh suatu aparatur pemerintahan.

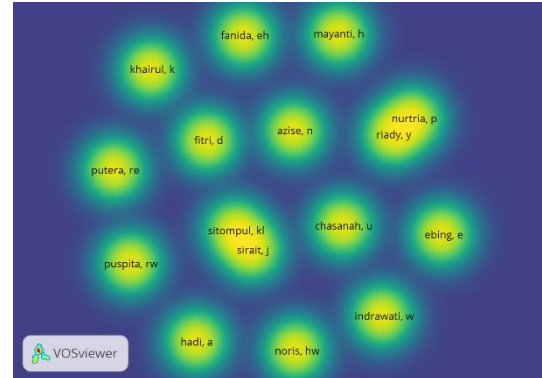
Gambar 1.1



(Sumber : Vos Viewer, 2025)

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa, penelitian tentang urgensi pelayanan SKCK dalam meningkatkan karir di Indonesia dari hasil VOS Viewer dengan data penelitian lebih dari 200 penelitian lebih berfokus terhadap SKCK.

Gambar 1.2



(Sumber : Vos Viewer, 2025)

Gambar di atas menunjukkan nama-nama yang telah melakukan penelitian tentang pelayanan SKCK dalam meningkatkan karir. Visualisasi kedalaman warna VOSviewer semakin pekat warnanya, maka menunjukkan semakin banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait keywords atau topik tersebut. Sebaliknya jika visualisasi kedalam warna pudar jarang yang dapat diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. Pentingnya SKCK dalam dunia kerja

Kebutuhan manusia harus dipenuhi dengan bekerja. Bagi lulusan jenjang pendidikan apa pun yang memilih untuk mencari nafkah sendiri, bekerja merupakan alternatif. Jika mereka menerima gaji sebagai imbalan atas kerja keras mereka, mereka akan mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Beban keuangan keluarga dapat dikurangi dengan menghargai kerja keras dengan bekerja.

pelanggaran norma kehidupan yang berlaku di masyarakat, seperti berafiliasi dengan organisasi yang dilarang. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diperlukan sebagai bukti perilaku baik saat melamar pekerjaan karena keterlibatan dalam perkara pidana atau perdata dapat menimbulkan kecurigaan terhadap perilaku salah satu pihak. Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) semakin marak karena saat ini diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa seseorang

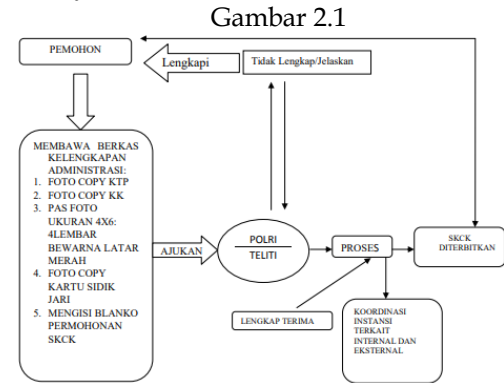
tidak melakukan tindak pidana dan berperilaku baik.

Peranan pendidikan sangat berpengaruh untuk menentukan tingkatan karier, oleh karena itu lulusan sekolah menengah hanya dipekerjakan sebagai buruh tanpa ada kenaikan jabatan yang pasti. Sumber daya manusia yang unggul dapat menawarkan peluang untuk memperoleh pekerjaan dan gaji yang sesuai dengan keterampilan mereka. Kebutuhan manusia dipenuhi oleh uang yang diperoleh melalui pekerjaan. Pendapatan dan tanggungan seseorang merupakan indikator tingkat kesejahteraan manusia. Ada kebutuhan dasar dan sekunder bagi manusia, dan jika Anda dapat memperoleh uang melalui pekerjaan, Anda dapat memenuhi kebutuhan Anda akan sandang, pangan, dan papan..

2. Proses Pengurusan SKCK dan Kendala yang Dihadapi

SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melalui fungsi Intelkam kepada pemohon/anggota masyarakat sebagai jawaban atas permohonan atau kebutuhan yang bersangkutan karena syarat-syarat yang dipersyaratkan, berdasarkan hasil dari pencarian data biologis dan catatan polisi yang tersedia tentang orang tersebut. (Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014). Pentingnya jasa pembuatan SKCK ini adalah kasusnya yang masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat seperti pencurian dapat mengikis. Fungsi catatan kriminal adalah sebagai alat bukti masyarakat. Apakah mereka terlibat dalam kasus kriminal dan memiliki sertifikat catatan kriminal? Kepolisian menjadi syarat utama untuk melamar pekerjaan. Kepolisian harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan maksimal untuk mencapai kepuasan masyarakat. SKCK adalah sertifikat yang paling dibutuhkan masyarakat. Adapun mekanisme pelayanan pembuatan SKCK yang harus dilalui oleh pemohon dalam standar operasional prosedur (SOP)

berdasarkan PERKAP Nomor 18 Tahun 2014 yaitu:



Sumber: Ditintelkam Polda Banten

Alur mengajukan SKCK yang dilakukan melalui loket dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke loket dengan membawa seluruh persyaratan.
2. Petugas meninjau permohonan dan memberikan formulir pendaftaran SKCK untuk diisi secara menyeluruh.
3. Pemohon mengisi formulir permohonan dan diambil sidik jarinya, kemudian akan diberikan formulir pernyataan kosong dan salinan sidik jari.
4. Memberikannya kepada pemberi layanan agar permohonan dapat diajukan
5. Menyerahkan SKCK di loket kepada pemohon.

Disisi lain pengaruh globalisasi, akan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju menciptakan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan semakin banyak disediakan oleh lembaga pemerintah. Namun syaratnya. Penyelenggaraan pelayanan publik masih berhadapan dengan sistem pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Syarat obyektif bagi terselenggaranya pelayanan publik masih menghadapi sistem pemerintahan yang belum efisien dan efektif Sumber daya manusia untuk peralatan belum memiliki kualitas yang memadai. Hal ini terlihat jelas melalui banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat secara

langsung atau melalui media, seperti rumit, ketidakpastian waktu, biaya tambahan, persyaratan tidak jelas, sikap agen yang buruk, daya tanggap, dan lain-lain, yang memberikan citra buruk kepada pemerintah. Ada juga bukti bahwa masyarakat frustrasi dengan pelayanan yang buruk. Masyarakat mengungkapkannya dalam pengaduan masyarakat melalui Ombudsman. Pada tahun 2017, Indonesia masih menduduki peringkat pertama. Pelayanan publik. Atas dasar itu, pemerintah berupaya untuk memperbaikinya. Berupa pelayanan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Strategis yaitu dengan cara mengambil langkah-langkah yang berisi instruksi untuk mencapai hal visi dan Misi yang sudah ditentukan.

3. Urgensi Pelayanan SKCK dalam Menunjang Profesionalisme dan Etika Kerja

Kualitas merupakan tingkat kesesuaian dengan persyaratan, dalam hal ini persyaratan pelanggan. Total quality service merupakan konsep tentang bagaimana menanamkan kualitas pelayanan pada setiap fase penyelenggaraan jasa yang melibatkan semua personel yang ada dalam organisasi (Handriana, 2008:59).

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan” Jadi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dengan waktu yang singkat, mudah serta dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat yang menikmati layanan itu. Pendapat lain Seperti yang dijelaskan (Kotler dalam Sampara Lukman 2010:4:

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Ibrahim (2008, dalam Hardiyansyah, 2018) mengemukakan bahwa “Kualitas Pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik tersebut”. Goetsch dan Davis (dalam Hardiyansyah, 2018) berpendapat bahwa “Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan”. Kualitas dalam pelayanan publik pada dasarnya adalah sikap atau cara seorang pegawai dalam melayani pelanggan atau masyarakat hingga merasa puas.

4. Pengaruh SKCK terhadap Peningkatan Karir di Sektor Pemerintah

Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan upah atas pekerjaan. Tujuan dari suatu pekerjaan adalah untuk mendapatkan uang dan barang-barang lainnya. Karena perusahaan hanya mempekerjakan karyawan yang berperilaku baik, maka perusahaan mengharuskan para pencari kerja untuk memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari tempat tinggalnya. (*STUDI DESKRIPTIF MENINGKATNYA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) TERHADAP PERSYARATAN KERJA BAGI LULUSAN JENJANG SLTA DI POLRES BANTUL*, 2016).

Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli yang menyatakan bahwa calon karyawan telah berperilaku baik dan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan wajib dilampirkan pada lamaran. Karena surat ini langsung dari kepolisian dan tidak ada manipulasi

catatan kriminal, maka surat ini sangat membantu semua calon pelamar kerja untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemberi kerja. Karena telah memenuhi persyaratan kerja baik untuk pekerjaan swasta maupun non-swasta, calon karyawan tanpa catatan kriminal dapat melamar pekerjaan di mana saja.

Untuk memenuhi permintaan seseorang atau keperluan lainnya, seperti melamar pekerjaan, CPNS, mendaftar TNI/POLRI, persyaratan pengacara, wali nikah, melanjutkan pendidikan, mengurus tunjangan VETERAN RI, relokasi penduduk, perangkat desa, dan sebagainya, pihak kepolisian akan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Untuk sinkronisasi data riwayat catatan kriminal, dilakukan usulan catatan kepolisian dari Polsek bersamaan dengan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres.

Saat melamar pekerjaan, pemberi kerja atau perusahaan wajib memberikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat bekerja. Karena Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang diakui di seluruh Indonesia, menggunakannya sebagai bukti perilaku baik dapat lebih dipercaya daripada menggunakan surat pernyataan bermaterai.

Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memberi Anda jaminan bahwa Anda dapat dipercaya saat mencari pekerjaan dan bahwa pelamar kerja tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan orang lain. Mempekerjakan orang dengan catatan kriminal dapat merusak citra perusahaan.

5. Pentingnya Sosialisasi dan Penyederhanaan Proses Pengurusan SKCK

Ditemukan kendala, setiap pemohon harus menghabiskan waktu satu jam untuk menyelesaikan proses pengajuan SKCK yang mana lebih lama dari prosedur standar. Petugas pelayanan

SKCK, Bapak Giono, mengatakan bahwa proses pengurusan SKCK biasanya berlangsung cepat, yakni sekitar setengah jam. Di sisi lain, proses ini bisa memakan waktu beberapa jam jika jumlah pelamar banyak. Selain itu, saat pelamar melakukan pendaftaran, ruang yang tersedia terasa terlalu sempit sehingga kurang memadai (*STUDI DESKRIPTIF MENINGKATKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) TERHADAP PERSYARATAN KERJA BAGI LULUSAN JENJANG SLTA DI POLRES BANTUL*, 2016).

Guna mengatasi permasalahan tersebut, untuk itu pihak Kepolisian memperbaiki kualitas pelayanan prima dengan mengeluarkan SKCK online yang mengacu pada Hasil Rapat Kabinet Membahas Reformasi Hukum pada Hari Selasa 11 Oktober 2016 tentang paket pertama Reformasi Hukum yang berisi lima fokus kebijakan dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik pada hukum Nasional dan aparat penegak hukum yang mana fokus ketiga pada program percepatan pelayanan publik seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK online merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh POLRI yang berbasis teknologi serta untuk memangkas sedikit birokrasi di Indonesia khususnya dalam pelayanan di sektor Kepolisian.

Adanya layanan SKCK online ini mempermudah masyarakat dalam pengurusan SKCK, jika sebelumnya dilakukan secara manual yang dirasa membutuhkan waktu lama, sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Rudy selaku petugas SKCK online (Fauzyiah, 2017).

Keunggulan lainnya dari layanan SKCK online ini yaitu pelayanan diberikan lebih cepat (1-2 menit) yang mengikuti proses mekanisme pelayanan dengan mendatangi kantor Polresta/Polsek dan mengambil nomor antrian, jika pemohon membuat SKCK baru harus melakukan perumusan sidik jari dengan menggunakan alat perekam

sidik jari (INAFIS) dan foto digital sedangkan bagi pemohon yang sudah memiliki kartu sidik jari akan langsung melakukan pengecekan keaslian KTP dengan menggunakan alat MAMBIS (Mobile Automatic Multi Biometric Identification) dari INAFIS yang terintegrasi dengan data E-KTP guna mencocokkan keaslian KTP. Setelah itu petugas akan melakukan Entry Data pemohon, jika yang bersangkutan memiliki catatan Kepolisian maka secara otomatis catatannya tercetak dilembar SKCK dan jika yang bersangkutan tidak memiliki catatan maka secara otomatis juga akan tercetak dilembar SKCK. Karena database pelaku tindakan pidana kriminal telah tersinkronisasi pada sistem SKCK online, selanjutnya proses dilakukan dengan print out dan penempelan foto serta cap stempel.

Adapun ketentuan dalam pengambilan layanan SKCK online ini yaitu pemohon SKCK yang melakukan registrasi online sebelum pukul 08:00 waktu setempat dapat mengambil SKCK di loket pelayanan sampai dengan pukul 14:00 pada hari yang sama dengan membawa dan menunjukkan kode registrasi serta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas loket pelayanan dan pemohon SKCK online diberikan kesempatan untuk mengambil SKCK paling lama 3 (tiga) hari kerja. Bila melebihi waktu tersebut sistem akan otomatis menghapus data pemohon dan pemohon harus melakukan registrasi ulang.

Berikut alur pendaftaran SKCK Online:

Gambar 2.2

Persyaratan dan Prosedur Pembuatan SKCK ONLINE

PERSYARATAN DOKUMEN

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- Pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 bulan
- Fotokopi Akta Lahir/Kematian
- Fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk dan hasil tangkapan layar (screenshot) kepesertaan aktif pada sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

PROSEDUR MEMBUAT SKCK ONLINE

1. Instal aplikasi "POLRI Super App" di handphone Anda. Pilih menu "Profil", lalu klik "Daftar Baru" untuk membuat akun menggunakan nomor telepon
2. Bagi yang sudah memiliki akun, silakan masuk menggunakan nomor telepon dan password. Pilih menu "SKCK", lalu klik "Ajukan SKCK" dan "Mulai"
3. Isi data keperluan pada kolom yang disediakan, termasuk email dan alamat sesuai KTP
4. Pilih metode pembayaran "Beli Virtual Account" dan klik "Bayar". Biaya pembuatan SKCK online sebesar Rp30.000
5. Barcode bukti pendaftaran dan pembayaran akan dikirim melalui email
6. Anda kemudian dapat mengunjungi loket kantor polisi sesuai tingkat kewenangan yang dipilih dengan membawa persyaratan dan menunjukkan barcode. Lakukan pengambilan sidik jari jika Anda belum memiliki dokumen sidik jari. Jika syarat semua lengkap, maka SKCK siap dicetak dan bisa langsung diambil

Sumber: Dit Intelkam Polda Banten

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan. Standar ini merupakan kewajiban dan janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Lebih spesifik lagi, standar pelayanan publik adalah spesifikasi teknis yang mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau badan layanan umum kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas dan pemerataan pelayanan, serta mencegah kesenjangan dalam akses layanan publik.

Saat melamar pekerjaan, pemberi kerja atau perusahaan wajib memberikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat bekerja. Karena Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang diakui di seluruh Indonesia, menggunakannya sebagai bukti perilaku baik dapat lebih dipercaya daripada menggunakan surat pernyataan bermaterai.

Komponen sosial tenaga kerja dapat ditingkatkan oleh sumber daya manusia dengan kepribadian dan sikap mental yang positif. Perusahaan memilih calon karyawan dengan meninjau kriteria administratif, seperti melengkapi dokumen yang disediakan perusahaan, memastikan bahwa lampiran surat lamaran pekerjaan lengkap, dan memverifikasi kebutuhan keuangan jika diperlukan. Prestasi akademis bukanlah faktor utama dalam menentukan keberhasilan kerja.

Manfaat yang diperoleh jika mempunyai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah dapat dipercaya dalam mencari pekerjaan dan dijamin oleh kepolisian bahwa calon pelamar kerja tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan berbagai pihak. Mempekerjakan tenaga kerja yang pernah

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Administrasi)

“Urgensi Pelayanan SKCK dalam peningkatan peluang karir di Indonesia”
10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

melakukan tindakan kriminal dapat merusak reputasi perusahaan.

Rekomendasi:

1. Menerapkan sistem antrian yang lebih efektif, seperti sistem nomor antrian online atau penambahan loket pelayanan, untuk mengurangi waktu tunggu pemohon.
2. Memberikan pelatihan tambahan kepada petugas mengenai komunikasi efektif dan penanganan keluhan pelanggan agar dapat merespons setiap pertanyaan dan keluhan dengan baik, bahkan dalam situasi sibuk.
3. Memberikan pelatihan tambahan kepada petugas mengenai komunikasi efektif dan penanganan keluhan pelanggan agar dapat merespons setiap pertanyaan dan keluhan dengan baik, bahkan dalam situasi sibuk

REFERENSI

- Fauzyiah, S. (2017). Inovasi Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polresta Sidoarjo. *Publika*, 5(5), 1-127.
- STUDI DESKRIPTIF MENINGKATNYA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) TERHADAP PERSYARATAN KERJA BAGI LULUSAN JENJANG SLTA DI POLRES BANTUL (2016).
- Wahyuni, W. A. Y. U., Studi, P., Dan, A., Publik, K., Pascasarjana, F., & Pasundan, U. (2024). *KUALITAS PELAYANAN*

SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN RESOR KOTA. 218010010.

- Fauzyiah, S. (2017). Inovasi Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polresta Sidoarjo. *Publika*, 5(5), 1-127.
- STUDI DESKRIPTIF MENINGKATNYA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) TERHADAP PERSYARATAN KERJA BAGI LULUSAN JENJANG SLTA DI POLRES BANTUL (2016).
- Wahyuni, W. A. Y. U., Studi, P., Dan, A., Publik, K., Pascasarjana, F., & Pasundan, U. (2024). *KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN RESOR KOTA. 218010010.*
- Fauzyiah, S. (2017). Inovasi Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Di Polresta Sidoarjo. *Publika*, 5(5), 1-127.
- STUDI DESKRIPTIF MENINGKATNYA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) TERHADAP PERSYARATAN KERJA BAGI LULUSAN JENJANG SLTA DI POLRES BANTUL (2016).
- Wahyuni, W. A. Y. U., Studi, P., Dan, A., Publik, K., Pascasarjana, F., & Pasundan, U. (2024). *KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DI KEPOLISIAN RESOR KOTA. 218010010.*